



FLYPAPER EFFECT: FENOMENA SERIAL WAKTU DAN LINTAS KABUPATEN/KOTA DI DAERAH AJATAPPARENG PROVINSI SULAWESI SELATAN

Flypaper Effect: Time Series And Cross Regency/ City Phenomenon in
Ajatappareng Area Of The Province Of South Sulawesi

MUHAMMAD ABDIAN ABDILLAH

Program Pasca Sarjana Universitas Muslim Indonesia Makassar
Email: muhammad_abdian@ymail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the phenomenon of Flypaper Effect in Ajatappareng area of South Sulawesi Province in the last 3 years and to know the condition of regional spending from 2014-2016. This type of research is qualitative research. The object of this research is Local Government of Parepare City, Pinrang Regency and Sidrap Regency. Data collection techniques used documentation to collect budget realization reports for 2014-2016 in the towns of Parepare, Pinrang and Sidrap districts and unstructured interviews to employees of the Parepare Municipal Finance Agency, Pinrang District Financial Agency and the District Financial Administration Agency of Sidrap Regency to collect data additional. The results of this study indicate that (1) there has been Flypaper Effect in the area of ajatappareng South Sulawesi Province in this case Parepare City, Pinrang Regency and Sidrap Regency during 2014-2015 because local government is more likely to use the balance fund than the original revenue area. (2) Expenditure of Kota Parepare, Pinrang and Sidrap Regencies Experienced in 3 years improvement from 2014-2016.

Keywords: *Flypaper Effect, Expenditure*

PENDAHULUAN

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan di undang-undang Otonomi daerah nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah menggantikan undang-undang Nomor 22 Tahun 1999. Kebijakan pemerintahan Indonesia tentang Otonomi Daerah dilaksanakan secara efektif pada tanggal 1 Januari 2001, yang dipandang akan menjadi kebijakan yang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi yang sesungguhnya.

Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan pada pasal 155 ayat 1 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pada ayat 2 dinyatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari pemerintah pusat dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara. Administrasi pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana yang dimaksud ayat 1 dilakukan secara terpisah dari administrasi pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Pelaksanaan otonomi daerah dimulai Januari 2001 menimbulkan reaksi yang berbeda-beda bagi daerah. Pemerintah daerah yang memiliki sumber kekayaan alam yang besar menyambut otonomi daerah dengan antusias, sebaliknya daerah yang memiliki sumber kekayaan alam yang kecil menanggapi dengan sedikit rasa khawatir.

Pengertian pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa "Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh

daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Pendapatan Asli Daerah salah satu tolak ukur untuk mengukur potensi daerah.

Peraturan Pemerintah nomor 104 tahun 2000 tentang dana perimbangan menjelaskan bahwa dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana perimbangan terbagi lagi menjadi beberapa dana seperti Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi umum dan Dana Bagi Hasil.

Menurut Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah bahwa belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Dana Perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Ketiga jenis dana tersebut bersama dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber dana daerah yang digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan di tingkat daerah. Setiap jenis dana perimbangan memiliki fungsinya masing-masing. Dana bagi hasil berperan sebagai penyeimbang fiskal antara pusat dan daerah dari pajak yang dibagihasilkan. DAU berperan sebagai pemerata fiskal antardaerah (*fiscal equalization*) di Indonesia. Dan DAK berperan sebagai dana yang didasarkan pada kebijakan yang bersifat darurat (Saragih dalam Kusumadewi: 2007).

Saat ini transfer pemerintah pusat ke pemerintah daerah di Indonesia yang dalam hal ini disamakan istilahnya dengan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Netto yang ditetapkan dalam APBN. Sehingga dalam prakteknya transfer dari pemerintah pusat merupakan sumber dana utama pemerintah daerah untuk membiayai operasi utamanya sehari-hari, yang oleh pemerintah daerah "dilaporkan" diperhitungan APBD. Tujuan dari transfer ini adalah untuk mengurangi (kalau tidak mungkin menghilangkan) kesenjangan fiskal antar pemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum di seluruh negeri.

Flypaper Effect merupakan suatu kondisi yang terjadi saat pemerintahan daerah lebih banyak menggunakan dana transfer yang dalam hal ini Dana Alokasi Umum (DAU) daripada menggunakan kemampuan sendiri dalam hal ini yang dimaksud Pendapatan Asli Daerah (PAD). *Flypaper effect* adalah suatu fenomena pada suatu kondisi ketika Pemerintah Daerah merespon belanja daerahnya lebih banyak berasal dari transfer/grants atau spesifiknya pada transfer tidak bersyarat atau unconditional grants daripada pendapatan asli dari daerahnya tersebut sehingga akan mengakibatkan pemborosan dalam Belanja Daerah. (Oktaviani:2014)

Menurut data dari kemendagri, komposisi Pendapatan Daerah pada APBD tahun anggaran 2012 secara nasional dikelompokkan dalam tiga kelompok yakni Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pada tahun 2012, dana perimbangan masih mendominasi sumber pendapatan daerah yaitu sebesar sebesar 69,0% atau Rp.380,601 triliun, sedangkan PAD hanya sebesar 20,4% atau sebesar Rp.112,720 triliun dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar 10,6% atau sebesar Rp.58,262 triliun.

Beberapa Penelitian Sebelumnya Menyatakan Kabupaten / kota di Jawa Timur umumnya mengalami *flypaper effect* terbukti atau diterima, respon BD masih lebih besar disebabkan oleh dana perimbangan khususnya yang berasal dari komponen DAU. Semakin besar dana transfer (DAU) yang diberikan pemerintah pusat ke pemerintah daerah, maka tingkat ketergantungan pemerintah daerah dalam membiayai belanja daerah juga akan semakin tinggi untuk melaksanakan program dan kegiatan yang ada di daerah. (Oktaviani:2014)

Daerah Sulawesi Tenggara pada tahun 2010-2013 terjadi *flypaper Effect* pada belanja daerah kabupaten/kota di provinsi tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam periode

pengamatan pemerintah daerah kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara terjadi inefisiensi penggunaan dana belanja daerah (Armawaddin:2015)

Sekarang ini, kemampuan asli sebagian besar daerah yang tercermin dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya mampu mengumpulkan tidak lebih dari 15% nilai APBD. Oleh Karena itu, kekurangannya harus dibantu melalui dana perimbangan yang terdiri dari DBH, DAU dan DAK.

Pendapatan Asli Daerah Kota Parepare pada tahun 2016 berjumlah 140.345.268.747,- yang berasal dari pajak, retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jumlah tersebut seperempat dari jumlah dana perimbangan yang diterima oleh pemerintah kota Parepare yang berjumlah Rp. 637.484.105.000,-. (PERDA Nomor 10 tahun 2016)

Kabupaten Pinrang Memiliki target Pendapatan Asli Daerah berjumlah Rp.89,800,740,443 dan Dana Perimbangan berjumlah Rp.740,537,032,555 untuk tahun 2016 lalu. Terlihat bahwa dana perimbangan terlalu besar dibandingkan dengan pendapatan asli daerah kabupaten pinrang (<http://www.bappeda.pinrangkab.go.id>). Sedangkan di kabupaten Sidrap juga memiliki target untuk tahun 2016 lalu sebesar Rp. 104,800,122,000.00 walaupun realisasinya pada tahun 2015 hanya 25% dari jumlah tersebut dan target untuk Dana perimbangan tahun 2016 sebesar Rp. 789,206,259,000.00, hal tersebut sama halnya dengan kota Parepare maupun kabupaten pinrang yang hanya bisa memaksimalkan potensi daerahnya sebesar 25% dari besaran bantuan dana yang mereka dapat dari pemerintah pusat. (RKPD Kabupaten Sidrap Tahun 2016).

Besarnya dana perimbangan daripada pendapatan asli daerah disebabkan karena penyerapan atau penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kota Parepare masih minim pada triwulan pertama dan kedua. Penyerapan anggaran yang minim dikarenakan banyaknya proyek yang belum ditender. Minimnya penyerapan anggaran artinya tidak mengelola dana transfer dengan baik sehingga mengakibatkan dipangkasnya dana transfer tahun berikut. Hal tersebut terjadi juga di kedua daerah lainnya yaitu kabupaten Pinrang dan Sidrap.

Apabila dana transfer yang berasal dari pemerintah pusat akan pangkas maka proyek fisik yang telah rencanakan akan terhambat, oleh karena itu pemerintah daerah lebih dahulu menggunakan Dana transfer tersebut karena takutnya dilakukan pemangkasan dana pada dana transfer tersebut. Hal inilah yang biasanya menyebabkan *Flypaper Effect* pada Belanja daerahnya karena pemerintah lebih dulu memilih menggunakan Dana transfernya ketimbang Pendapatan Asli Daerahnya.

Ketiga daerah yaitu dengan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan yang berbanding sangat besar tersebut berpotensi mengalami *Flypaper Effect*. karena tiap tahunnya mulai tahun 2012 perbandingan yang sangat besar.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang telah dilakukan oleh Oktaviani (2014) yaitu "*Flypaper Effect*: Fenomena serial waktu dan lintas kabupaten kota di Jawa Timur tahun 2003-2013" mengambil penelitian secara runtun mencakup periode penelitian dari tahun 2003 hingga 2013 sedangkan peneliti sekarang meneliti Pengaruh PAD dan terhadap belanja daerah menggunakan periode tahun 2012-2016 dengan sampel Kota dan Kabupaten di wilayah Ajatappareng, relatif lebih sempit daripada peneliti terdahulunya.

Teori Stewardship

Stewardship Theory berangkat dari perpektif pemikiran akuntansi manajemen yang banyak didasari teori-teori psikologi dan sosiologi. *Stewardship Theory* atau pengabdian berasumsi bahwa manusia pada hakikatnya mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, dapat dipercaya, berintegritas tinggi dan memiliki kejujuran. Teori ini memandang manajemen sebagai pihak yang mampu melaksanakan tindakan yang sebaik-baiknya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan *stakeholders* (Anton:62).

Stewardship theory dalam akuntansi menjelaskan sebuah konstruk pola kepemimpinan dan hubungan komunikasi antara *shareholder* dan manajemen, atau dapat pula hubungan antara top manajemen dengan para manajer di bawahnya dalam sebuah organisasi perusahaan dengan mekanisme situasional yang mencakup filosofis manajemen dan

perbedaan budaya organisasi, dan kepemimpinan dalam pencapaian tujuan bersama tanpa menghalangi kepentingan masing-masing.

Konsep teori ini didasarkan pada asas kepercayaan pada pihak yang diberikan wewenang, dimana manajemen dalam suatu organisasi dicerminkan sebagai *good steward* yang melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasannya secara penuh tanggung jawab. *Stewardship Theory* adalah harmonisasi antara pemilik modal (*principles*) dengan pengelolaan Modal (*Steward*) dalam mencapai tujuan bersama. Para Ahli teori *Stewardship* Mengasumsikan bahwa adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi.

Flypaper Effect

Dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat akan mentransfer dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan bagian daerah dari dana bagi hasil yang terdiri dari pajak dan sumber dana alam. Di samping dana perimbangan tersebut, pemda mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa pendapatan asli daerah (PAD), Pembiayaan dan lain-lain pendapatan. Kebijakan pendanaan semua dana tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah. *Flypaper Effect* merupakan suatu kondisi keuangan pemerintah daerah yang membelanjakan lebih banyak dan lebih boros dengan menggunakan dana transfer atau Dana Alokasi Umum dibandingkan dengan menggunakan dana sendiri atau Pendapatan Asli Daerah. Istilah *flypaper effect* diperkenalkan pertama kali oleh Courant, ramlich, dan Rubinfeld (1979) untuk mengartikulasikan pemikiran Arthur Okun (1930) yang menyatakan "*money sticks where it hits*". *Flypaper effect* merupakan suatu kondisi dimana stimulus terhadap pengeluaran daerah yang disebabkan oleh adanya perubahan dalam jumlah transfer (*unconditional grants*) dari pemerintah pusat lebih besar dari yang disebabkan oleh perubahan dalam pendapatan daerah (Maimunah dalam deni oktivia: 2014).

Flypaper Effect itu sendiri merupakan respon yang tidak simetris atau asimetris terhadap peningkatan dan penurunan penggunaan dana transfer dari pemerintah pusat, dimana Tresch (2002) menyatakan dalam Amalia (2015) bahwa dana transfer tersebut diberikan untuk jangka waktu tertentu dengan indikasi adanya pihak yang memperoleh keuntungan dari penerimaan transfer (*grants*) yang cenderung meningkat. Dengan kata lain penemuan *flypaper effect* pada alokasi pengeluaran, maka diharapkan pemerintah dapat seminimum mungkin memperkecil respon yang berlebihan pada belanja daerah. Analisis mengenai *Flypaper Effect* mengandung dua prinsip dasar yaitu: 1) model yang menunjukkan bagaimana pemerintah merespon bantuan dana transfer (*grants*) yang akan digunakan untuk mengukur demand pelayanan publik; 2) model median (rata-rata) merupakan model yang dipilih untuk melihat respon transfer per wilayah yang menerima bantuan dana transfer dari pemerintah, dimana pemerintah melihat ada indikasi bahwa dana yang diberikan harus habis untuk dibelanjakan, sehingga anggapan tersebut dapat mempengaruhi pendapatan daerah mereka sendiri. (Tresch dalam Fitri Amalia: 2015). *Flypaper Effect* terjadi karena adanya superioritas pengetahuan birokrat mengenai transfer dari pemerintah pusat. Informasi lebih yang dimiliki oleh birokrat ini memungkinkan para birokrat ini melakukan pengeluaran yang berlebih. Terdapat beberapa hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan adanya *flypaper effect* pada Belanja Daerah.

Flypaper Effect adalah suatu fenomena pada suatu kondisi ketika Pemerintah Daerah merespon belanja daerahnya lebih banyak berasal dari transfer/grants atau spesifiknya pada transfer tidak bersyarat atau unconditional grants daripada pendapatan asli dari daerahnya tersebut sehingga akan mengakibatkan pemborosan dalam Belanja Daerah. Unconditional grants yang diprosikan dengan Dana Alokasi Umum ditentukan berdasarkan celah fiskal yaitu kebutuhan fiskal dikurangi kemampuan fiskal daerah dan alokasi dasar yang dialokasikan secara keseluruhan (*lump sum*) dari pemerintah pusat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, data-data angka yang diperoleh dari laporan seperti APBD ataupun LRA akan di deskripsikan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui nilai dari variabel tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain.

Aktivitas dalam analisis data kualitatif ada tiga, yaitu tahap reduksi data, display data, dan kesimpulan atau verifikasi.

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Reduksi tidak perlu diartikan sebagai kuantifikasi data.

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya apabila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan, seperti komputer, notebook, dan lain sebagainya.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan.

Dalam penelitian kuantitatif, penyajian data dapat dilakukan dengan menggunakan tabel, grafik, pictogram, dan sebagainya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

Dengan adanya penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Selanjutnya oleh Miles dan Huberman disarankan agar dalam melakukan display data, selain dengan teks yang naratif, juga dapat berupa grafik, matrik, network (jaringan kerja), dan chart.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan.

Langkah ketiga dalam analisis data dalam penelitian kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan mengalami perubahan apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Pendapatan Asli Daerah di daerah ajatappareng berjumlah 15% dari Jumlah Dana Perimbangan yang dikirim oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Jumlah Pendapatan Asli Daerah kota Parepare pada tahun 2014 hanya sebesar Rp.86.131.560.841,00 dibandingkan dengan Dana Perimbangan yang berjumlah Rp.476.229.282.178,00 sedangkan jumlah belanja daerah sebesar Rp.711.954.276.729,00. Pada tahun 2015 Pendapatan Asli daerah kota Parepare meningkat sebesar Rp.122.188.461.211,00 dan jumlah Dana Perimbangan Rp.593.764.770.000,00 dengan range 400 milyar lebih daripada Pendapatan Asli Daerah. Jumlah Belanja Daerah parepare meningkat pula menjadi Rp. 987.033.211.482,00.

Tahun 2016 Pendapatan Asli Daerah kota Parepare Rp.138.015.117.571,00 Meningkat lagi dan jumlah Dana Perimbangan yang paling meningkat menjadi Rp.844.593.897.431,00 begitupun dengan jumlah belanja daerah yang meningkat menembus angka Rp.1.186.572.478.390,00. Berikut ini adalah jumlah pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja daerah Kota Parepare selama 3 Tahun dalam bentuk tabel :

No	Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Dana Perimbangan	Belanja Daerah
1	2014	Rp.86.131.560.841,00	Rp.476.229.282.178,00	Rp.711.954.276.729,00.
2	2015	Rp.122.188.461.211,00	Rp.593.764.770.000,00	Rp. 987.033.211.482,00
3	2016	Rp.138.015.117.571,00	Rp.844.593.897.431,00	Rp.1.186.572.478.390,00

Sumber. Laporan Realisasi Anggaran Kota Parepare Tahun 2014-2016

Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Parepare Bidang Anggaran menjelaskan bahwa anggaran di kota Parepare digunakan sesuai jenis kegiatannya, Ketika anggaran dari dana perimbangan belum tiba maka pemerintah daerah kota parepare menggunakan pendapatan asli daerahnya untuk melaksanakan kegiatan atau melakukan belanja tetapi hal ini tidak pada kegiatan yang memiliki anggaran yang besar seperti belanja pegawai.

Belanja Daerah kota Parepare setiap tahunnya seperti pada tabel 29 diikuti dengan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan kota Parepare bahkan Belanja Daerah kota Parepare melebihi Pendapatan Asli daerah dan Dana Perimbangannya walaupun telah ditambahkan. Artinya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pemerintah Kota Parepare setiap tahunnya mulai tahun 2014 – 2016 melebihi anggaran yang mereka miliki.

Dari beberapa penjelasan diatas dapat dikatakan kota Parepare telah terjadi *Flypaper Effect* Karena Jumlah pendapatan asli daerah tidak bisa membiayai semua belanja daerah bahkan belum bisa membiayai belanja tidak langsung kota Parepare dan pemerintah daerah kota Parepare lebih cenderung menghabiskan dana perimbangan mereka yang tiap tahun realisasinya sesuai target anggaran berbeda dengan pendapatan asli daerah mereka yang hanya tahun 2014 yang realisasinya mencapai target anggaran, hal tersebut yang menyebabkan pemerintah daerah kota parepare mengalami fenomena *Flypaper Effect*.

Berikut ini adalah jumlah pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja daerah Kabupaten Pinrang selama 3 Tahun dalam bentuk tabel:

No	Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Dana Perimbangan	Belanja Daerah
1	2014	Rp.87.007.522.019,00	Rp. 704.024.658.555,00	Rp.1.044.975.887.597,89
2	2015	Rp.95,035,256,694.00	Rp.853,258,058,555.00	Rp.1.290.366.790.312,13
3	2016	Rp.101,829,567,935.00	Rp.1,090,643,385,555.00	Rp.1.435.838.832.746,75

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kab. Pinrang Tahun 2014-2016.

Pendapatan Asli Daerah didaerah ajatappareng Cuma berjumlah 15% dari Jumlah Dana Perimbangan yang dikirim oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Jumlah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pinrang pada tahun 2014 hanya sebesar Rp.87.007.522.019,00 dibandingkan dengan Dana Perimbangan yang berjumlah Rp.704.024.658.555,00 sedangkan jumlah belanja daerah sebesar Rp. 1.044.975.887.597,89

Pada tahun 2015 Pendapatan Asli daerah Kabupaten Pinrang meningkat sebesar Rp.95,035,256,694.00 dan jumlah Dana Perimbangan sebesar Rp.853,258,058,555.00. Jumlah Belanja Daerah Kabupaten Pinrang meningkat pula menjadi Rp.1.290.366.790.312,13. Tahun 2016 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pinrang Rp.101,829,567,935.00 Meningkatkan lagi dan jumlah Dana Perimbangan yang paling meningkat menjadi Rp. 1,090,643,385,555.00 begitupun dengan jumlah belanja daerah yang meningkat menembus angka Rp.1.435.838.832.746,75.

Badan Keuangan Daerah Kabupaten pinrang menjelaskan bahwa Dana Perimbangan jelas digunakan diawal periode karena ada anggaran yang disiapkan untuk membayar belanja pegawai dalam hal ini gaji pegawai pemerintah dan itu sumbernya dari dana perimbangan. Berdasarkan penjelasan diatas dan data dari tabel 30 dapat terlihat bahwa pendapatan asli daerah kabupaten pinrang tidak bisa membiayai keseluruhan belanja daerah kabupaten pinrang hal tersebut dapat dikatakan *Flypaper Effect* Karena pemerintah daerah kabupaten Pinrang lebih cenderung menggunakan dana Perimbangan untuk melakukan belanja Operasi daripada pendapatan asli daerah karena memang belanja operasi yang didalamnya ada belanja pegawai bersumber dari dana perimbangan namun pemerintah kabupaten pinrang telah memaksimalkan pendapatan asli daerahnya dengan merealisasikan Pendapatan asli daerah melebihi target anggaran mereka.

Di Kabupaten Sidrap pun Seperti pada kota Parepare dan Kabupaten Pinrang yang memiliki Peningkatan PAD dan Dana Perimbangan Maupun Belanja Daerah Seperti Pada Tabel Dibawah:

No	Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Dana Perimbangan	Belanja Daerah
1	2014	Rp.84.289.908.000,00	Rp.629.270.336.000,00	Rp. 938.070.380.000,00
2	2015	Rp.101.304.105.000,00	Rp.779.795.679.000,00	Rp.1.214.890.525.000,00
3	2016	Rp.132.582.303.650,00	Rp.1.140.579.906.000,00	Rp.1.570.211.979.000,00

Sumber. Laporan Realisasi Anggaran Kab. Sidrap Tahun 2014-2016.

Jumlah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidrap pada tahun 2014 hanya sebesar Rp.84.289.908.000,00 dibandingkan dengan Dana Perimbangan yang berjumlah Rp.629.270.336.000,00 sedangkan jumlah belanja daerah sebesar Rp. 938.070.380.000,00. Pada tahun 2015 Pendapatan Asli daerah Kabupaten Pinrang meningkat sebesar Rp.101.304.105.000,00 dan jumlah Dana Perimbangan sebesar Rp.779.795.679.000,00. Jumlah Belanja Daerah Kabupaten Pinrang meningkat pula menjadi Rp.1.214.890.525.000,00. Tahun 2016 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pinrang Rp.132.582.303.650,00 Meningkatkan lagi dan jumlah Dana Perimbangan yang paling meningkat menjadi Rp.1.140.579.906.000,00 begitupun dengan jumlah belanja daerah yang meningkat menembus angka Rp.1.570.211.979.000,00.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Sidrap Bidang Akuntansi dan pelaporan menjelaskan Pendapatan Asli Daerah hanya bisa menutupi sebagian kecil dari Belanja daerah kabupaten sidrap dan sebagian besarnya memang berasal dari dana perimbangan. Kepala bagian Akuntansi dan pelaporan juga menjelaskan bahwa setiap kegiatan sudah diatur harus menggunakan dana dari mana seperti belanja pegawai berasal dari dana alokasi umum. Berdasarkan penjelasan dan data dari tabel 31 dapat dikatakan bahwa di kabupaten sidrap telah terjadi *Flypaper Effect* Karena pemerintah daerah kabupaten Sidrap lebih cenderung menggunakan dana Perimbangan untuk melakukan belanja Operasi daripada pendapatan asli daerah karena memang belanja operasi yang didalamnya ada belanja pegawai bersumber dari dana perimbangan karena pendapatan asli daerah kabupaten sidrap tidak bisa membiayai keseluruhan belanja daerahnya.

B. Pembahasan

Berdasarkan Hasil Penelitian bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan digunakan secara bersamaan untuk belanja karena penggunaan anggaran seperti Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus dibedakan sasarannya. Contohnya saja untuk Belanja Operasi dalam hal ini Belanja Pegawai itu bersumber dari Dana Alokasi Umum dan Belanja Pegawai tersebut berubah pembayaran gaji mereka. Pembayaran gaji dilakukan di akhir tetapi telah disiapkan diawal periode ketika Dana Perimbangan tiba dari pusat. Dana perimbangan juga tidak dikirim langsung keseluruhan tetapi bertahap per triwulannya.

Suatu daerah yang potensi fiskalnya rendah maka Dana Perimbangan yang diterimanya tinggi. Sedangkan suatu daerah yang potensi fiskalnya tinggi maka Dana Perimbangan yang diterimanya rendah. Hal ini menunjukkan kemandirian daerah tergantung pada Pemerintah Pusat untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerahnya. Dilihat juga dari pengertiannya tujuan pemberian Dana Perimbangan itu sendiri pada dasarnya sebagai “alat pancing” untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Teori *stewardship* adalah harmonisasi pemilik modal dan pengelola modal untuk mencapai tujuan bersama. Dari hasil penelitian juga dapat dikatakan bahwa pemerintahan pusat telah mempercayakan kepada pemerintah daerah untuk mengelola pendapatan asli daerahnya masing-masing dan juga mempercayakan dana perimbangan kepada pemerintah daerah untuk dikelola dengan baik dalam melakukan belanja daerah, hal ini sudah sejalan dengan teori *stewardship* dimana adanya kepercayaan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Karena dengan diberikannya kepercayaan kepada pemerintah daerah untuk mengelola dana perimbangan maka teori *stewardship* telah diterapkan di pemerintah daerah untuk mencapai tujuan bersama yaitu mewujudkan otonomi daerah yang ideal.

Prakosa dalam Amalia (2015) menyatakan dimana secara empiris besarnya belanja daerah dipengaruhi oleh jumlah Dana Perimbangan yang diterimanya dari pemerintah pusat. Hal tersebut menunjukkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat masih tinggi. Beberapa penelitian yang menggunakan alat analisis Regresi Linear berganda menghasilkan bahwa *Flypaper Effect* Terjadi pada Pemerintah daerah di Indonesia.

Pendapatan Asli daerah Pemerintah Daerah Kota Parepare selama tahun 2014-2016 mengalami peningkatan. Demikian pula dengan dana perimbangan kota Parepare yang setiap tahun meningkat mulai tahun 2014-2016. Meningkatnya pendapatan Asli Daerah dan dana perimbangan memicu meningkatnya belanja daerah dari tahun 2014-2015. Besarnya belanja daerah tidak dapat dibiayai semua oleh pendapatan asli daerah maka dari itu dana perimbangan kota Parepare membantu untuk melakukan belanja daerahnya. pemerintah kota Parepare cenderung menggunakan Dana perimbangan lebih dulu untuk belanja daerahnya Karena belanja tidak langsung yang ada di kota parepare yaitu belanja pegawai harus dibayarkan lebih dulu. Maka dari itu telah terjadi *Flypaper Effect* Pada pemerintah daerah kota parepare karena lebih merespon dana perimbangan untuk belanja daerahnya yang menyebabkan pendapatan asli daerah tidak terealisasi sesuai target tiap tahunnya dan dana alokasi umum tiap tahunnya terealisasi sesuai target.

Setiap tahun mulai dari tahun 2014 sampai 2016 transfer dana perimbangan kepada pemerintah Kabupaten Pinrang mengalami peningkatan, hal tersebut dipicu dengan belanja daerah yang meningkat tiap tahunnya. Belanja daerah yang dibagi menjadi belanja operasi dan belanja modal pada pemerintah daerah kabupaten Pinrang yang didalamnya terdapat belanja pegawai yang harus dimulai pada awal periode anggaran harus dibayarkan. Dana alokasi umum dan khusus di kabupaten pinrang selalu terealisasi sesuai anggaran yang di kirim oleh pemerintah pusat seperti pada kota parepare berbanding terbalik dengan pendapatan asli daerah kabupaten pinrang yang tidak pernah terealisasi sesuai target mulai dari tahun 2014-2016. Berdasarkan hal tersebut pemerintah daerah kabupaten pinrang dapat dikatakan telah terjadi *Flypaper Effect*

karena kabupaten pinrang lebih merespon belanja daerah menggunakan dana perimbangan lebih dulu dibandingkan pendapatan asli daerah.

Dana Transfer pemerintah pusat meningkat dari tahun 2014 sampai tahun 2016 begitupun dengan pendapatan asli daerah dan belanja kabupaten sidrap. Sama seperti kota parepare dan kabupaten pinrang yang kegiatan pertamanya adalah belanja pegawai maka pemerintah kabupaten pinrang merespon belanja daerahnya dengan dana perimbangan terlebih dahulu daripada pendapatan asli daerah. Dana alokasi umum yang terealisasi sesuai target tiap tahunnya meningkatkan peningkatan pada dana perimbangan setiap tahunnya di kabupaten sidrap dan pendapatan asli daerah yang tidak mencapai target realisasi setiap tahunnya tidak dapat di maksimalkan pemerintah daerah kabupaten sidrap. Hal tersebut menunjukkan bahwa terjadi fenomena *Flypaper Effect* Pada pemerintah daerah kabupaten sidrap.

Fenomena *Flypaper Effect* dibeberapa daerah yang terjadi di Indonesia disebabkan karena pemerintah daerah lebih dominan menggunakan Dana Perimbangan, hal tersebut jika diukur menggunakan dengan alat ukur statistik bukan dilihat pada proses penggunaan anggarannya yang ternyata kegiatan pemerintah memang diawali dengan Belanja Pegawai dalam hal ini Belanja Gaji untuk pegawai Negeri Sipil. *Flypaper Effect* Terjadi karena Pemerintah Daerah lebih merespon menggunakan Dana Perimbangannya dibanding pendapatan asli daerahnya untuk melaksanakan belanja daerahnya. hal tersebut banyak terjadi di provinsi-provinsi yang ada di Indonesia begitupun provinsi Sulawesi selatan. Akan tetapi, penelitian terdahulu tentang *Flypaper Effect* ini semuanya menggunakan Regresi Linear Berganda lalu diolah dengan Program sedangkan ketika *Flypaper Effect* di analisis menggunakan jenis kegiatannya maka semua daerah di Indonesia Pasti akan Mengalami *Flypaper Effect* karena Kegiatan pertama kali untuk semua pemerintah daerah di Indonesia yaitu adalah belanja pegawai dalam hal ini belanja gaji Pegawai Negeri sipil seluruh Indonesia.

Penelitian Amalia (2015) Menghasilkan Bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum secara simultan berpengaruh Signifikan terhadap Belanja Daerah. Sementara itu pengujian secara parsial menunjukkan bahwa Dana Alokasi umum dan Pendapatan Asli daerah Berpengaruh secara Signifikan terhadap Belanja Daerah Tetapi Mendapatkan hasil tidak Terjadi *Flypaper Effect* Karena Pendapatan Asli Daerah lebih besar pengaruhnya daripada Dana Perimbangan di Provinsi Banten. Dibandingkan dengan penelitian diatas pendapatan asli daerah memang akan berpengaruh lebih besar dari pada dana perimbangan karena jumlah pendapatan asli daerah lebih sedikit jumlahnya dari pada dana perimbangan dalam hal ini dana alokasi umum.

Penelitian Purbarini (2015) juga menghasilkan tidak terjadi *Flypaper Effect* Pada Belanja Modal Pemerintah Kabupaten di Indonesia Tetapi Terjadi *Flypaper Effect* pada Belanja Operasi. Kedua penelitian tersebut memiliki kesamaan menggunakan Regresi Linear berganda dan diolah menggunakan Spss dan menghasilkan tidak terjadi *Flypaper Effect* pada Belanja Modal dan tidak terjadi pada Belanja Operasi Tetapi jika dianalisis *Flypaper effect* pada belanja modal dikarenakan pendapatan asli daerah lebih banyak digunakan kegiatan belanja modal daripada dana perimbangan yang lebih dominan digunakan untuk belanja operasi.

Semakin berkembang suatu daerah semakin tinggi anggaran yang dibutuhkan maka semakin tinggi tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat. Dilihat setiap tahunnya pada pemerintah daerah di Ajatappareng tingkat ketergantungan pada dana perimbangan mengalami peningkatan dikarenakan pendapatan asli daerah tidak bisa di maksimalkan setiap tahunnya oleh pemerintah daerah.

Pemerintah daerah merespon belanja daerahnya menggunakan Dana Perimbangan digunakan lebih banyak daripada Pendapatan Asli Daerah karena jumlah Dana Perimbangan yang di terima pemerintah daerah di ajatappareng dari tahun 2014 – 2016 lebih besar 5 kali lipat daripada jumlah Pendapatan Asli Daerahnya bahkan dikabupaten Pinrang dan Kabupaten Sidrap pada tahun 2016 Dana Perimbangannya lebih besar sampai 10 kali lipat daripada Pendapatan Asli Daerahnya hal ini dikarenakan tingginya

belanja pegawai Rupiah jadi dana perimbangan yang dikirim oleh pemerintah pusat juga menjadi besar.

Flypaper Effect terjadi karena belanja Daerah dari pemerintah daerah direspon dengan menggunakan dana perimbangan daripada pendapatan asli daerah, hal ini memang sudah menjadi hal pokok bagi pemerintah daerah karena belanja daerah terbagi menjadi 3 belanja operasi seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja Subsidi dan lain-lain. Belanja modal yang terdiri dari Belanja Modal tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan bangunan, dan lain-lain. Dan terakhir Belanja Tak terduga. Adapun pemerintah merespon Belanja Daerah mereka dengan melakukan belanja Operasi dulu yakni belanja pegawai.

Belanja Daerah tahun 2014 – 2016 di Ajatappareng mengalami Peningkatan. Meningkatnya setiap tahun belanja daerah karena Jumlah Kegiatan meningkat juga. Ketergantungan dengan pemerintah pusat tidak bisa dipungkiri akan tetapi walaupun belanja daerahnya mengalami peningkatan, Pendapatan Asli Daerahnya meningkat. Jadi *Flypaper Effect* Terjadi karena Kegiatan Pemerintah Daerah juga Meningkat tetapi Potensi daerah mereka juga dapat di maksimalkan karena adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah Setiap tahunnya mulai dari tahun 2014-2016.

Pendapatan Asli Daerah dan dana perimbangan setiap tahunnya meningkat dalam 3 tahun terakhir ini di daerah Ajatappareng, begitupun belanja daerah yang juga meningkat setiap tahunnya. Fenomena *Flypaper Effect* terjadi juga di daerah ajatappareng disebabkan oleh Kegiatan Belanja Pemerintah daerah diawali dengan menggunakan anggaran yang berasal dari dana alokasi umum yaitu belanja pegawai di awal periode.

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik Simpulan bahwa:

1. Telah terjadi *Flypaper Effect* Pada pemerintah daerah kota parepare Karena pemerintah lebih cenderung menggunakan dana perimbangan untuk belanja daerah daripada pendapatan asli daerah hal tersebut tidak dapat dihindari karena pemerintah daerah dituntut untuk menggunakan dana perimbangan lebih dulu dengan melakukan belanja gaji, baik yang ada di belanja tidak langsung maupun belanja langsung.
2. Telah terjadi *Flypaper Effect* Pada pemerintah daerah Kabupaten Pinrang pemerintah lebih cenderung menggunakan dana perimbangan untuk belanja daerah daripada pendapatan asli daerah hal tersebut tidak dapat dihindari karena pemerintah daerah dituntut untuk menggunakan dana perimbangan lebih dulu dengan melakukan belanja pegawai yang ada pada belanja operasi.
3. Telah terjadi *Flypaper Effect* Pada pemerintah daerah kabupaten Sidrap pemerintah lebih cenderung menggunakan dana perimbangan untuk belanja daerah daripada pendapatan asli daerah hal tersebut tidak dapat dihindari karena pemerintah daerah dituntut untuk menggunakan dana perimbangan lebih dulu dengan melakukan belanja pegawai yang ada pada belanja operasi.
4. Fenomena *Flypaper Effect* ini setelah dilihat dari sudut pandang yang berbeda bukan menggunakan analisis statistik melainkan lebih pada mengamati dan mewawancari pengguna anggaran akan berdeda hasilnya. Metode Deskriptif Kualitatif memastikan terjadi *Flypaper Effect* pada Belanja Daerah. *Flypaper Effect* terjadi Karena Dana Perimbangan direspon lebih dulu untuk belanja daerah daripada Pendapatan Asli Daerah, Hal tersebut tidak bisa dihindari karena Pemerintah daerah dituntut untuk menggunakan Dana Perimbangan lebih dulu karena belanja operasi dianggarkan untuk menggunakan Dana Alokasi Umum yang dalam hal ini untuk melaksanakan Belanja Pegawai atau membayar gaji pegawai negeri sipil. Ketika Dana Alokasi Umum tidak dipergunakan untuk Proporsinya masing-masing akan berdampak kepada Opini Badan pemeriksa Keuangan karena tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuannya. Artinya telah terjadi Fenomena *Flypaper Effect* di Daerah

Ajatappareng Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini Kota Parepare, Kabupaten Pinrang dan kabupaten Sidrap pada Tahun 2014-2016.

5. Terjadinya Fenomena *Flypaper Effect* ini menyebabkan Meningkatnya Belanja Daerah di Daerah Ajatappareng Provinsi Sulawesi Selatan Meningkat Setiap tahunnya mulai Dari tahun 2014-2016. *Flypaper Effect* juga Meningkatkan Jumlah Pendapatan Asli Daerah tiap tahun karena dipicu oleh meningkatnya belanja tahun sebelumnya.

B. SARAN

Berdasarkan Simpulan, beberapa upaya perlu dilakukan untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan memaksimalkan Potensi Daerah antara lain:

1. Disarankan kepada Pemerintah Daerah Kota Parepare Kabupaten Pinrang dan Kabupaten Sidrap Menggunakan memaksimalkan penggunaan Pendapatan Asli Daerah untuk memaksimalkan Potensi daerah dan tidak tergantung pada Dana Perimbangan yang menyebabkan *Flypaper Effect*.
2. Diharapkan Kepada Pemerintah Daerah Kota Parepare, Kabupaten Pinrang dan kabupaten Sidrap menggunakan Anggaran Pendapatan Asli Daerahnya Dengan maksimal untuk kegiatan-kegiatan yang memiliki manfaat ekonomi yang tinggi.
3. Diharapkan Pemerintah Daerah agar Menggunakan Anggaran sesuai dengan Ketentuan yang berlaku.
4. Diharapkan pada peneliti selanjutnya untuk melakukan penkajian yang lebih mendalam tentang *Flypaper Effect* yang ada di daerah ajatappareng, sehingga daerah Ajatappareng dapat memaksimalkan Potensi Daerah mereka masing-masing.
5. Diharapkan Pada Peneliti selanjutnya untuk memperluas penelitian penelitian *Flypaper Effect* tidak hanya di daerah ajatappareng Provinsi sulawesi Selatan saja melainkan menjadi seluruh Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, F. (2015). Analisis Flypaper Effect pada Belanja Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten. *Jurnal Organisasi dan Manajemen Volume 11 Nomor 1* , 15-25.
- Armawaddin, M. (2015). Analisis Flypaper Effect pada belanja Daerah kabupaten/kota di sulawesi tenggara. *Jurnal Ekonomi Pembangunan FE-UNHALU Volume XVI tahun 8* , 13-19.
- Hartati. (2009). FLYPAPER EFFECT PADA DANA ALOKASI UMUM (DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah Serta Dampaknya terhadap Kinerja Keuangan Pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal AKuntansi Sektor Publik* .
- Hediyanto, L., & Rahayu, S. (2014). *Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah pada Kota Bandung Periode 2008 -2012*. Bandung: Universitas Telkom.
- Indonesia, P. P. *Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi*. Makassar.
- Kusumadewi, D. A., & Rahman, A. (2007). FLYPAPER EFFECT PADA DANA ALOKASI UMUM (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Indonesia. *JAAI Volume 11 Nomor 1* , 67-80.
- Mentayani, I., Hayati, N., & Rusmanto. (2012). Flypaper effect pada dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah kota dan kabupaten di provinsi kalimantan selatan. *jurnal spread volume 2 nomor 1* , 55-64.

- Oktavia, D. (2014). Flypaper effect: Fenomena Serial Waktu dan Lintas Kabupaten kota di jawab timur 2003-2013. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember Vol. 12 No. 2* .
- Parepare, P. D. (2014 - 2016). *Laporan Realisasi Anggaran*. Kota Parepare: Pemerintah Daerah Kota Parepare.
- Penyerapan Anggaran Pemerintah Kota Parepare Minim*. (2015, juli 22). Dipetik Agustus 10, 2017, dari Tempo.co.
- peraturan daerah Nomor 10 Tahun 2016*. (2016). Parepare.
- Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 Tentang dana Perimbangan*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Pinrang, P. D. (2014 - 2016). *Laporan Realisasi Anggaran*. Kabupaten Pinrang: Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang.
- Purbarini, E., & Masdjojo, G. N. (2015). Flypaper effect on operationg expenditure and capital expenditure of the city Government in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan 16 (1)* , 75-84.
- Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sidrap*. (2016).
- Santoso, I., Suparta, I. W., & Saimul. (2015). Flypaper Effect Pada Pengelolaan Keuangan Daerah Di Provinsi Lampung. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Volume 4 Nomor 2* , 135-166.
- Siagian, P. A. (2009). *Flypaper Effect pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Daerah Pemerintahan Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara*. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Sidrap, P. D. (2014 - 2016). *Laporan Realisasi Anggaran*. Kabupaten Sidrap: Pemerintah Daerah Kabupaten Sidrap.
- Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah*.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*.
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah*.
- www.Bappeda.Pinrangkab.go.id. (t.thn.). Dipetik 7 1, 2017